

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan pertama bagi negara, maka tidak dapat dipungkiri bahwa peran pajak sangat penting bagi setiap negara termasuk Indonesia. Pendanaan yang diperoleh negara berasal dari pajak, baik pajak langsung maupun pajak yang tidak langsung. Oleh karena itu ketergantungan negara sangat kuat pada sektor pajak sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam kedudukan sebagai wajib pajak. Keberhasilan negara dalam memperoleh pendanaan dari sektor pajak pada hakekatnya merupakan keberhasilan pegawai pajak dalam mengelola, melaksanakan, dan merencanakan pendapatan pajak. Pegawai pajak adalah setiap orang dalam kedudukannya yang berkerja pada Kantor Direktorat Jendral Pajak. Salah satu tugas pegawai pajak yang harus dipatuhi ialah mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Namun, tidak banyak dari sekian banyak para aparatur pajak menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contoh yang sering kita temukan yaitu tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur pajak pada *Merdeka.com diakses(1 November 2015)*:

“Pada tahun 2010, Kementrian Keuangan Republik Indonesia digegerkan dengan penemuan kasus penggelapan, pencucian uang, dan korupsi oleh pegawai Dirjen pajak golongan III A, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan Gayus dijerat dengan pasal berlapis ketika jaksa penuntut umum menuntut Gayus dengan empat dakwaan sekaligus. Dalam dakwaan pertama, ia dijerat pasal UU Nomor 21 Tahun 2000, ia diduga menerima suap senilai Rp 925 juta dari Roberto Santonius dan Rp 35 milyar dari Alif Kuncoro terkait pengurusan sunset policy PT. Kaltim Prima Coal, PT. Bumi Resources, dan PT. Arutmin.

Berbeda dengan dakwaan pertama, dalam dakwaan kedua, Gayus dianggap telah menerima gratifikasi sebesar US\$ 659.800 dan 9,6 juta SGD namun tidak melaporkan ke KPK. Sedangkan dalam dakwaan ketiga, Gayus dijerat dengan pasal UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dengan menyembunyikan asal usul harta kekayaan ke dalam penyedia layanan jasa keuangan”.

Adanya berbagai kasus korupsi ini menyebabkan kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap pelaku pengelola keuangan negara semakin hari semakin menipis, penipisan rasa percaya tersebut terjadi karena uang yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah adalah uang yang berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat pada periode tertentu (Mardiasmo, 2002: 62). Kantor Pelayanan Pajak merupakan organisasi pemerintah yang berada dibawah naungan Direktorat Jendral Pajak yang ditunjuk untuk mengelolah penerimaan pajak yang telah dibayarkan oleh para wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak dibagi menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya yang khusus menangani wajib pajak besar (Badan) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang khusus menangani wajib pajak pribadi. Kantor Pelayanan Pajak juga merupakan organisasi publik dimana aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh para aparatur pajak adalah memberikan jasa-jasa pelayanan yang terbaik, serta kemudahan-kemudahan dalam perpajakan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan, penerapan, sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sedermayanti, 2014: 10).

Luthans (2006), berpendapat bahwa komitmen organisasi sebagai sikap kerja yang berdampak positif terhadap organisasi. Dampak positif yang ditunjukkan diantaranya adanya rasa memiliki antara pegawai dan organisasi, adanya rasa tanggungjawab oleh pegawai terhadap organisasi terkait hasil kinerja yang dicapai, adanya keinginan untuk tetap bergabung dengan organisasi untuk terwujudnya visi dan misi organisasi. Maka, dapat disimpulkan tingginya

komitmen organisasi pada diri individu (pegawai) maka tinggi pula kepeduliannya terhadap organisasi, sehingga individu tersebut akan terus berusaha untuk menjadikan organisasinya kearah yang lebih baik. Komitmen dalam organisasi bisa diukur dengan pencapaian kinerja pegawai, dimana komitmen organisasi dibentuk atas dasar adanya keterlibatan pegawai yang bertujuan untuk mencapai tujuan utama organisasi.

Julianto dan Hendriani (2014), berpendapat bahwa keberhasilan suatu organisasi ataupun suatu instansi salah satunya akan dipengaruhi oleh kinerja pegawai (*job performance*) atau hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai melaksanakan sesuai tugasnya dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pada Kantor Pelayanan Pajak pegawai dituntut untuk bisa mencapai keberhasilan atas tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan tersebut merupakan hasil kinerja para pegawai/aparatur pajak, tentunya hasil tersebut harus berkualitas, efektif dan mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Rivai (2011: 837), menyebutkan motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertindak laku dalam mencapai tujuan. Dorongan tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu arah perilaku (kerja untuk mencapai tujuan), dan kekuatan perilaku (seberapa kuat usaha individu dalam bekerja).

Kesimpulan dari pendapat diatas, dalam pencapaian tujuan organisasi, pegawai memerlukan motivasi untuk menunjang pekerjaannya. Dilihat dari pentingnya pegawai dalam organisasi, maka seorang pegawai harus lebih diperhatikan terhadap tugas yang dikerjakan sehingga tujuan organisasi tercapai. Dengan motivasi kerja yang tinggi, pegawai akan bekerja lebih giat didalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya dengan motivasi kerja yang rendah karyawan tidak mempunyai semangat bekerja, mudah menyerah, dan kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pada penelitian ini populasi yang diambil pada Kantor pelayanan Pajak yang berada di Sidoarjo, yaitu Kantor pelayanan Pajak Madya Sidoarjo, Kantor pelayanan Pajak Sidoarjo Utara, Kantor pelayanan Pajak Sidoarjo Selatan, Kantor pelayanan Pajak Sidoarjo Barat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja aparatur pajak ?
2. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja aparatur pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja aparatur pajak pada kantor pelayanan pajak di Sidoarjo.
2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja aparatur pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Sidoarjo.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi wajib pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk penunjang dalam meningkatkan kinerja aparatur pajak.

b. Menjadi masukan yang dapat diterima secara positif oleh aparatur pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak serta pelayanan kepada masyarakat.

3. Bagi Pembaca

a. Diharapkan bisa memberi wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan.

b. Sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khusus pada permasalahan yang sama.